



# Data dan Informasi Bencana Indonesia

*Many countries are increasingly vulnerable to violent conflicts or natural disasters that can erase decades of development and further entrench poverty and inequality. Through its global network, UNDP seeks out and shares innovative approaches to crisis prevention, early warning and conflict resolution.*

*And UNDP is on the ground in almost every developing country -- so wherever the next crisis occurs, we will be there to help bridge the gap between emergency relief and long-term development*

# Pendahuluan

Termotivasi dari kehancuran 26 Desember 2004 akibat gempa dan Tsunami Samudra Hindia, paradigma bencana bergeser dari pengelolaan tanggap bencana (Disaster Response) menjadi pengurangan resiko bencana (Disaster Risk Reduction). Pergeseran ini terjadi baik di tingkat internasional dan di Indonesia. Pengelolaan bencana masyarakat itu didorong untuk memastikan bahwa perekaman, pemantauan dan analisis kecenderungan yang jelas dalam kejadian, magnitude, dan dampak bencana secara efektif dilaksanakan. Untuk memahami lebih lanjut dampak bencana terhadap manusia dan juga untuk menangani dengan lebih baik bencana sebagai perusak hasil pembangunan, adalah penting untuk memahami bukti sejarah bencana. Melalui pemahaman ini, komunitas pembangunan kemanusiaan internasional yang lebih luas dapat berkontribusi dalam diskusi tentang bagaimana membekali masyarakat yang rentan dan pemerintah dengan lebih baik dengan kapasitas untuk mengidentifikasi bahaya dan resiko, mengurangi resiko yang telah teridentifikasi, sementara

mempersiapkan untuk menghadapi bencana dan merencanakan pembangunan.

Adopsi dari HFA<sup>1</sup> pada tahun 2005 dan pembentukan aliansi GRIP (Program Identifikasi Resiko Global) di awal 2006-keduanya sama-sama tepat waktu dan saling menguntungkan. Dukungan oleh Regional Biro Pencegahan Krisis dan Pemulihan UNDP dan ISDR PBB yang dipimpin GRIP untuk mencontoh LARED2 American Latin - yang kemudian dikembangkan-menjadi DesInventar - perangkat lunak untuk pelacakan sejarah dampak bencana di seluruh wilayah. Pengumpulan dari data spesifik negara baik dari pemerintah dan sumber-sumber non-pemerintah kemudian memperoleh kemudahan politis dan dukungan keuangan yang diperlukan.

<sup>1</sup> Konferensi Dunia mengenai Pengurangan Bencana diadakan dari 18 – 22 Januari 2005 di Kobe, Hyogo, Jepang, dan menerima Kerangka Kegiatan untuk 2005-2015: Membangun Pemulihan yang Cepat Negara dan Masyarakat dari Bencana (untuk kemudian disebut dengan "HFA").

Konferensi menyediakan kesempatan yang unik untuk mempromosikan pendekatan yang strategis dan sistematis untuk mengurangi kerentanan [1] dan resiko bahaya. [2] Menggarisbawahi kebutuhan untuk, dan mengetahui cara untuk, membangun pemulihan yang cepat untuk negara dan masyarakat dari Bencana [3] Sumber: <http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm>

Di Indonesia, pada tahun 2005, DesInventar berada di dalam UNDP Indonesia, dan disiapkan untuk diserahkan kepada Pemerintah Indonesia. Pada tahun 2006, usaha awal untuk mentransfer data, perangkat lunak dan kepemilikan DesInventar ke Pemerintah Indonesia dipenuhi dengan keengganan. Keengganan ini sebagian disebabkan oleh adanya database inventarisasi serupa pada individu di tingkat kementerian, serta pemasaran yang tidak efektif mengenai metodologi DesInventar: DesInventar adalah alat pengelolaan data dan informasi yang kuat yang sudah diuji dalam banyak negara lain, dan tidak sekedar 'database lain'. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini BAKORNAS PB tidak memiliki mandat operasional untuk pengambilalihan kepemilikan data sejarah DesInventar, dan hal ini diperparah dengan tidak adanya pengakuan pemerintah mengenai validasi data. Pada tahun 2006, struktur Pengelolaan Bencana Indonesia mendapatkan kemudahan tetapi masih ada kekosongan hukum dan karena itu penerimaan DesInventar disambut dengan

keraguan: departemen-departemen pemerintah tidak mempunyai otoritas, kemampuan atau kemauan untuk menjadi pemegang database dan data yang dianggap 'tidak valid'. (Lihat Pelajaran yang didapat: Reformasi Hukum Pengelolaan Bencana – Pengalaman Indonesia.) Selain itu, waktu yang direncanakan untuk penyerahan database ini tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan baik: ada sedikit insentif bagi pihak berwenang untuk menerima tanggung jawab; pihak berwenang tidak siap untuk memahami kekuatan DesInventar sebagai alat pengelolaan informasi untuk advokasi, perencanaan dan sumber daya tujuan mobilisasi; dan, terutama otoritas pemerintahan ini tidak yakin akan terjadinya reformasi hukum dan dampak pada mandat masing-masing otoritas.

Pelajaran yang didapatkan melalui evaluasi DesInventar menjadi yang sekarang dimiliki secara nasional – Database Informasi dan Data Bencana Indonesia (DIBI) – dapat menyediakan komunitas pembangunan yang lebih luas, serta pemerintah negara

lainnya, dengan pengetahuan untuk pemanfaatan peralatan pengelolaan informasi dan politik dalam pembentukan alat pelacak informasi yang kuat dan lengkap tersebut. Mungkin yang terutama untuk Indonesia, pemerintah daerah – provinsi, kabupaten dan kecamatan – akan mengerti tujuan pembentukan platform informasi ‘jenis DIBI’ di daerah yang terhubung dengan DIBI nasional dan dapat menggambarkan secara jelas biaya bencana dalam hubungannya dengan kerugian dalam kemajuan pembangunan. Administrasi ini dapat didukung oleh DIBI dalam memimpin proses penanaman pengurangan resiko bencana, yang sesuai dengan konteks yurisdiksi mereka, dalam rencana pembangunan mereka sendiri. Dengan hal ini di dalam benak, DIBI akhirnya diluncurkan sebagai database yang dimiliki secara nasional pada 29 Juli 2008, yang berada di dalam kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru dibentuk.

# Bagaimana situasi Sebelum adanya DesInventar dan DIBI?

6

Seperti yang disebutkan dalam pendahuluan, ada banyak pelaku pengumpulan data pemerintah termasuk: BAKORNAS PB (Badan Koordinasi Nasional untuk Penanggulangan Bencana), BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Koordinator Kementerian Kesejahteraan Rakyat, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, Departemen Pertahanan, Polri, kekuatan militer, BPS (Badan statistik Nasional) serta layanan dan biro di tingkat daerah (di provinsi dan kabupaten). Masalah rumit berikutnya, desentralisasi tanggung jawab administrasi pemerintahan kepada kabupaten dan provinsi sebagai bagian dari Undang-undang Otonomi Daerah Indonesia (antara lain UU No.22/1999 dan UU 25/1999) yang berarti bahwa tanggung jawab pengumpulan data tidak jelas, sementara secara bersamaan banyak dari provinsi dan kabupaten baru sedang dibentuk. (Jumlah provinsi meningkat dari 27 pada tahun 1999 menjadi 33 pada tahun 2008. Jumlah kabupaten meningkat dari sekitar 340 (terdapat berbagai jenis pengaturan

administrasi untuk kota / daerah yang berbeda) pada tahun 1999 menjadi 492 kabupaten dengan otonomi administratif pada 2008.<sup>2</sup>

Dengan berlakunya UU no. 24/2007 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BNPB kini memiliki mandat untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi mengenai terjadinya dan dampak bencana alam di Indonesia. (Lihat Pelajaran yang Didapat: Reformasi Hukum Pengelolaan Bencana). Data sejarah DIBI digunakan oleh BNPB untuk identifikasi resiko, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, terutama untuk memastikan bahwa dana disalurkan untuk mengurangi resiko berdasarkan kecenderungan dan pola yang diidentifikasi melalui analisa berdasarkan DIBI. Jenis analisa ini menguntungkan semua pemangku kepentingan, fokus perhatian pada inisiatif resiko bencana dalam cara yang koheren di seluruh negeri.

<sup>2</sup> Sumber: Badan Statistik Nasional – [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

# Apakah DesInventar itu dan bagaimana Berevolusi menjadi DIBI? Siapa yang terlibat?

'DIBI' adalah singkatan dari Database Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia yang dikembangkan dengan menggunakan perangkat lunak dan metodologi DesInventar dan DesConsultar. Modul DesInventar adalah database yang relational dan struktural yang berisi data dalam bidang-bidang yang tidak pasti (data interval dan temporal, tipe kejadian, dll.) dan akibat langsung (kematian manusia, hilangnya rumah, infrastruktur, aktivitas ekonomi). Modul DesConsultar memberikan akses kepada database dengan pertanyaan-pertanyaan yang mencakup hubungan bermacam-macam variabel efek, jenis kejadian, lokasi, tanggal, dll. Pada saat yang sama, modul ini memberikan gambaran dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam bentuk tabulasi dan grafik dan peta tematis.

Perangkat lunak DesInventar adalah satu dari sangat sedikit metodologi yang terbukti untuk membangun sistem pengelolaan informasi bencana yang dapat mengelola secara homogen, analisa dan penggambaran grafik informasi tentang kejadian

bencana dan kerugian yang disebabkan. Sejak dimulainya pada tahun 1993, ketika Jaringan Studi Sosial mengenai Pencegahan Bencana di Amerika Latin (LA RED) mulai membangun database inventori bencana yang sistematis, perbaikan terus-menerus dan percobaan yang teliti telah dilaksanakan. Banyak badan-badan nasional di Amerika Latin dan lainnya menggunakan DesInventar untuk menilai resiko, merencanakan pengurangan resiko, dan merancang sistem peringatan dini. Selain itu, metodologi DesInventar secara bertambah diaplikasikan untuk memantau langkah-langkah pengurangan resiko, dan mengevaluasi kesiapan rencana mitigasi.

Didorong oleh Biro untuk Pencegahan dan Pemulihan Krisis Regional UNDP (RBCPR), UNDP Indonesia menggunakan DesInventar dalam respon post-Tsunami sebagian untuk memperkenalkan standar internasional dalam pengumpulan data dan pengelolaan informasi bencana ketika sistem nasional yang komprehensif tidak tersedia pada

saat itu. Bersama dengan BAPPENAS, BAKORNAS PB (sekarang BNPB), Departemen Dalam Negeri dan DFID, program SC-DRR UNDP, telah mendukung desentralisasi dan aplikasi metodologi DesInventar di Indonesia. RBCPR UNDP di Bangkok telah menyediakan dukungan tambahan yang diperlukan dengan cara instalasi dan pengaturan perangkat lunak, pelatihan teknis serta bimbingan dan dukungan yang menyeluruh. BCPR PBB telah memberikan kesempatan teratur bagi BNPB, BAPPENAS dan personil pemerintah lainnya untuk berpartisipasi dalam kesempatan pembelajaran di daerah. Semua dukungan ini telah mendorong transfer pengetahuan dan membangun momentum untuk membangun DIBI.

UNDP dan program SC-DRR telah mendukung penyusunan dan validasi sejumlah besar data melalui alat pengelolaan informasi bencana, DesInventar, yang mencapai puncaknya dengan peluncuran DIBI (Data dan Informasi Bencana Indonesia) pada tanggal 29 Juli 2008 oleh Kepala BNPB, Dr. Syamsul Ma'arif.

DIBI dapat diakses online di: <http://dibi.bnpb.go.id>

Saat ini, data yang tersedia secara online dalam DIBI didasarkan pada data pemerintah resmi untuk tahun 1997-2007. Tim DIBI telah mulai mengumpulkan data tentang bencana yang telah terjadi selama 30 tahun di tingkat provinsi dalam format yang disepakati. Orientasi dan pelatihan terus diberikan kepada personil di provinsi-provinsi untuk mengumpulkan dan memasukkan data bencana. Pada waktu yang sama, BNPB telah membentuk sebuah Forum Data dan Informasi yang menyediakan platform untuk semua pemangku kepentingan kunci untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan atas isu-isu mengenai data yang terkait bencana. Melalui forum ini, BNPB bekerja dengan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan dan memvalidasi data bencana dan memastikan ketersediaannya untuk semua pihak melalui DIBI.

Sumber data untuk telah DIBI diambil dari unit koordinasi tanggap



Dari kiri ke kanan: UNDP Country Director - Mr Hakan Bjorkman, Direktur Khusus dan Daerah Tertinggal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai SC-DRR Nasional Program Director - Mr Suprayoga Hadi, Kepala BNPB – Mr Syamsul Ma'arif dan Kepala BNPB Pusat Data dan Informasi - Mr Priyadi Kardono

bencana daerah yang terdahulu -- Satkorlak PB (Unit Koordinasi Tanggap Bencana Provinsi) dan Satlak PB (Unit Koordinasi Tanggap Bencana Kabupaten). Satkorlak PB akan menjadi BPBD pada akhir 2009 dan Satlak PB akan berubah menjadi BPBD tingkat kabupaten di mana resiko bencana dianggap tinggi pada kabupaten tersebut. Metodologi analisa data, penyusunan informasi dan pemanfaatan pengetahuan telah ditingkatkan oleh pasukan gabungan Badan Penelitian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), BMKG (Badan Meteorologi,

Klimatologi dan Geofisika), dan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), dan Departemen Sumber Daya Energi dan Mineral (DESDM).

Sejak diluncurkan pada tahun 2008, sistem Pengelolaan Informasi DIBI telah diperkenalkan secara bertahap pada pemerintah melalui lokakarya sosialisasi / familiarisasi. Baru-baru ini, beberapa propinsi juga telah melakukan lokakarya sosialisasi / familiarisasi, Jawa Tengah, Yogyakarta, Aceh, dan Bengkulu. Provinsi-provinsi di timur Indonesia dijadwalkan untuk lokakarya sosialisasi / familiarisasi DIBI pada setengah tahun kedua tahun 2009. Di samping lokakarya sosialisasi / familiarisasi, SCDRR dan tim DIBI BNPB BPS melakukan FGD sebagai tindak lanjut lokakarya sosialisasi awal: FGD ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan interaktif lebih baik bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan, mencari penjelasan dan mengusulkan modifikasi berbasis konteks untuk kebutuhan khusus masing-masing pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun daerah. DIBI, sebagai

alat analisa data sejarah bencana, dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk merencanakan program-program pembangunan yang lebih baik dan mengamankan investasi mereka. Analisa dampak bencana berbasis DIBI dalam lokasi dan konteks tertentu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan, tindakan, atau inisiatif lain yang diperlukan untuk mengurangi kerugian yang disebabkan oleh bencana.

Forum data dan informasi yang diadakan oleh BNPB, kini terdiri dari 12 badan / dinas pemerintah. Peserta forum meliputi polisi, militer, pekerja publik, dinas sosial, departemen kesehatan, dan departemen pendidikan. Forum ini menyediakan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan membangun koalisi yang penting untuk kerangka kerja yang sama karena DIBI akan diterapkan di seluruh wilayah. Pada forum Maret 2009, BPS (Biro Statistik Nasional), direktorat tambahan dari dalam dinas kesehatan dan perwakilan dari Departemen Pertanian ikut bergabung ke dalam

grup. Pengembangan perwakilan ini menunjukkan kesadaran yang meluas mengenai DIBI dan juga penerimaan yang lebih luas untuk DIBI sebagai alat pengelola informasi yang kuat: tidak hanya dalam tingkat pelaku tanggap bencana tradisional, tetapi kini juga dalam perencanaan dan struktur operasional pemerintah yang lebih luas.

# Bagaimana DIBI digunakan? Oleh siapa?

Bappenas dan BNPB membentuk sistem informasi peristiwa bencana yang disebut dengan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), yang sekarang secara formal digunakan oleh Pemerintah Indonesia, sebagai database sejarah bencana lintas-sektor di semua kabupaten dan provinsi di Indonesia. Diharapkan dalam jangka menengah, BNPB dan BPBD dapat mengisi alat pengelola informasi bencana online ini sehingga dapat mencakup semua provinsi dan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terkait. Utamanya, DIBI, pada tingkat nasional dan daerah diharapkan untuk: meningkatkan kapasitas perencanaan pengelolaan bencana di setiap tahapan siklus pengelolaan bencana; mendukung pelaporan dan pemantauan bencana; dan, menyediakan informasi mengenai bencana untuk pemerintah dan aksi kemanusiaan di Indonesia dan negara-negara lain.

DIBI nasional akan segera mencakup hasil penilaian resiko bencana nasional pertama Indonesia, dan telah digunakan sebagai dasar untuk kebijakan,

pendanaan DRR (Pengurangan Resiko Bencana) dan keputusan perencanaan pembangunan. DIBI akan menyediakan informasi untuk melaporkan penerapan HFA. DIBI telah menyediakan rincian kerugian di beberapa provinsi dan kabupaten, yang apabila digabungkan dengan penilaian resiko bencana nasional akan mendapatkan analisa yang lebih mendalam mengenai kemajuan yang dibuat dalam mengurangi kerugian melalui penerapan kewaspadaan / program mitigasi dan inisiatif pengembangan kapasitas.

Program SCDRR (Safer Communities through Disaster Risk Reduction) yang telah menggunakan DIBI untuk mengidentifikasi daerah Rawan Bencana di seluruh Indonesia. Indeks Rawan Bencana memeriksa sembilan jenis bencana di semua provinsi dan kabupaten berdasarkan pada data sejarah. Indeks Rawan Bencana dapat menjadi dasar keputusan mengenai kabupaten-kabupaten mana yang harus mempunyai BPBD-nya sendiri. Lihat Gambar 1 di bawah, dan <http://gis.sc-drr.org/?p=440> untuk peta daerah rawan bencana di tingkat kabupaten.

Tinjauan web-traffic situs DIBI pada bulan November 2008, Februari 2009, dan Juni 2009, menunjukkan peningkatan yang stabil halaman yang dilihat dan waktu yang dihabiskan di situs. Pelacakan alamat masing-masing IP menunjukkan bahwa jumlah pengguna meningkat dua kali lipat selama periode tersebut. Pengunjung baru, berdasarkan pelacakan alamat IP, menyumbang 40%

dari kunjungan atas tiga perempat data webtraffic. Tingkat kunjungan kembali sekitar 30% dan adanya kecenderungan meningkatnya waktu yang dihabiskan di situs karena pengunjung menjadi lebih akrab dengan tampilannya. Sebagian besar pengguna dapat diidentifikasi sebagai BNPB, jajaran departemen/kementerian, dan administrasi daerah: sebagai hasil dari lokakarya sosialisasi/



Gambar 1. Peta - Indeks Wilayah Rawan Bencana di Indonesia

familiarisasi, FGD dan pelatihan pemangku kepentingan nasional dan daerah. Kebanyakan pengunjung situs menggunakan fungsi riset / hasil, dan lebih sedikit halaman grafik dan peta yang dilihat. Juga terdapat bukti bahwa meningkatnya jumlah pengunjung kembali menggunakan fungsi pencarian yang lebih canggih, seperti, pencarian tematik dengan jenis resiko dan kabupaten untuk menilai kerugian dan kerusakan historis dan prioritas langkah-langkah potensial pengurangan resiko. Statistik web dan bukti yang bersifat anekdot mengindikasikan bahwa para akademis mengakses dan menggunakan DIBI untuk keperluan riset dan para mahasiswa juga telah memanfaatkan DIBI. Keragaman dari pengguna juga meningkat: pengunjung internasional dari lebih dari 10 negara menyumbangkan sekitar 10% dari keseluruhan kunjungan.

DIBI telah digunakan untuk membuat kebijakan seperti ketika pemerintah menggunakan analisa daerah rawan banjir untuk mengembangkan daftar kabupaten yang harus didorong

untuk membentuk BPBD sendiri di tingkat kabupaten atau kota. Di luar sensitifitas politik dan birokrasi, jenis informasi ini juga digunakan oleh Departemen Keuangan dan BAPPENAS untuk menetapkan garis anggaran pada Dana Anggaran Umum untuk pengucuran dana kepada kabupaten-kabupaten yang membentuk BPBD.

Dalam BAPPENAS, Direktorat Pengentasan Kemiskinan, membentuk SCDRR NPD (Direktur Kabupaten-Kabupaten belum berkembang berada di bawah BAPPENAS) untuk membuat prioritas berdasarkan daerah rawan bencana. Prioritisasi daerah rawan bencana ini hendaknya dilaksanakan untuk semua kegiatan SCDRR, serta program-program lainnya yang didanai oleh donor. Program yang didanai oleh donor lainnya termasuk: PNPM Mandiri, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP); Program Percepatan Pembangunan Daerah (P2DTK); Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan (PPIP); dan, Pengembangan Infrastruktur Sosial

Ekonomi Wilayah (PISEW); yang pada intinya hal ini bertujuan untuk meningkatkan data dalam DIBI untuk menilai tingkat kerawanan dan tingkat resiko (risk exposure) di daerah. Proses telah dimulai untuk menggabungkan sumber data dari anggota Forum Data dan Informasi yang meliputi anak-anak usia sekolah, status kesehatan, infrastruktur, fasilitas umum, tingkat pendapatan, jenis mata pencaharian, dan data perencanaan berkala. Hal ini akan memungkinkan pembuatan target yang lebih baik atas program-program untuk mengurangi resiko bencana pada daerah-daerah yang paling rentan. Selain contoh-contoh penggunaan DIBI oleh BAPPENAS ini, direncanakan juga untuk menggunakan metodologi yang sama untuk memantau dampak krisis ekonomi global.

ISDR PBB mendorong upaya untuk menghubungkan kemiskinan dan resiko bencana dan akan menggunakan DIBI untuk analisa data, akhirnya menghubungkannya kepada Database Peristiwa Darurat Internasional, ([www.emdat.net](http://www.emdat.net)) yang memungkinkan perbandingan

penilaian internasional atas kerawanan terhadap bencana dengan jenis dan sosial-ekonomi data.

SCDRR bersama dengan BNPB telah mengembangkan dua modul pelatihan, keduanya memerlukan waktu satu hari: Data Input Training dan Data User Training. Data User Training (Pelatihan Pengguna Data) ditujukan untuk memberikan kepada pengguna keterampilan yang diperlukan untuk membuat pertanyaan yang efektif – menggunakan DIBI untuk kepentingan riset dan analisa. Data Input Training (Pelatihan untuk Memasukkan Data) dirancang untuk personil dalam pemerintah pusat maupun daerah yang akan bertanggungjawab untuk memasukkan data. Pada tingkat nasional, data akan dimasukkan ke dalam DIBI nasional, Pada tingkat daerah, masing-masing BPBD akan mempunyai sistem pengelolaan informasi model-DIBI sendiri yang dapat dihubungkan dengan DIBI tingkat nasional.

Pada tingkat nasional, Data User Training telah disediakan untuk mereka yang disebutkan dalam Forum

Data dan Informasi, serta pelaku PNPM Mandiri, Bank Dunia dan Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan pada tingkat daerah, pelatihan ditujukan agar sesuai dengan kebutuhan, tergantung dari kebutuhan provinsi atau kabupaten dan berdasarkan pada penilaian resiko bencana nasional dengan prioritas yang ditentukan oleh Index Rawan Bencana. Dapat dilihat bahwa perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten dan provinsi, contohnya Rencana Pengembangan Jangka-Menengah Daerah dan Rencana Kerja Tahunan, akan mengacu kepada data DIBI kabupaten / provinsi dan DIBI nasional untuk memasukkan DRR ke dalam rencana ini. Beberapa Departemen dan dinas pelayanan di tingkat nasional dan daerah telah meminta pelatihan, baik Data Input dan Data User, agar dapat dipenuhi oleh BNPB.

Saat ini, BNPB sedang dalam proses bekerja bersama provinsi-provinsi yang terpilih seperti Yogyakarta, Jawa Tengah, Bengkulu dan Aceh untuk membentuk sistem DIBI provinsi (Lihat Tabel 1 dan 2 di bawah.) Peluncuran

untuk DIBI Aceh direncanakan pada Oktober 2009 sehubungan dengan Data User Training (Pelatihan untuk Pengguna Data) untuk badan-badan yang terkait DRR provinsi dan Pusat Riset Mitigasi Bencana dan Tsunami (TDMRC).

Seperti telah disebutkan di atas, proses pengembangan DIBI di tingkat daerah telah dimulai: SCDRR menargetkan empat provinsi untuk mempunyai kapasitas dan infrastruktur teknologi untuk sistem pengelolaan informasi bencana model-DIBI mereka sendiri telah terbentuk pada akhir 2009, termasuk Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Bengkulu. (Lihat Tabel 1 dan 2 di bawah).

# Bagaimana DIBI akan dikembangkan dan ditingkatkan lebih lanjut?

---

16

Dalam tahun-tahun mendatang, karena BPBD tingkat provinsi dan kabupaten telah dibentuk, BNPB akan mendukung pemerintah daerah untuk melaksanakan DIBI dengan pelatihan untuk Data User dan Data Input: mengikuti model Bengkulu yang dijelaskan pada Kotak 1. Setelah BPBD dibentuk dan sistem DIBI yang diadopsi, pelatihan dan dukungan teknis akan disediakan (Lihat Kotak 2 di bawah ini tentang komentar mengenai peluncuran DIBI di Provinsi Yogyakarta (DIY) dan komentar mengenai pemanfaatannya untuk saat ini dan rencana pengembangan lebih lanjut.)

**Tabel 1: DIBI Daerah Model Bengkulu**



Sosialisasi DIBI di Bengkulu

Pada 21 April 2009, BNPB, didukung oleh SCDRR mengadakan lokakarya sosialisasi / familiarisasi di Provinsi Bengkulu dengan tujuan pelaksanaan DIBI di tingkat provinsi. Lokakarya ini dihadiri oleh 42 perwakilan dari semua unit pemerintah daerah, perguruan tinggi dan LSM. Tujuan lokakarya ini adalah untuk mendapatkan

dukungan dari pemerintah provinsi untuk memanfaatkan DIBI di tingkat provinsi untuk menganalisa kecenderungan dan dampak bencana secara sistematis sehingga dapat membawa ke pencegahan, mitigasi yang lebih baik dan langkah-langkah kewaspadaan dan untuk mengurangi dampak keparahan bencana pada masyarakat.

Acara sosialisasi pertama di Bengkulu ini sukses, dengan partisipasi luas semua sektor pemerintah daerah, LSM lokal dan akademis. Program SCDRR bertujuan untuk membantu BNPB mentransfer DIBI ke tingkat propinsi dan kabupaten melalui serangkaian kegiatan yang direncanakan: sosialisasi / familiarisasi, FGD, pelatihan Data User dan Data Input. Langkah kedua dalam proses ini, FGD, dijadwalkan pada Oktober 2009, dan dimaksudkan untuk menerapkan metodologi DIBI untuk konteks di Bengkulu dengan menekankan pentingnya melengkapi DIBI setempat dengan 30 tahun data bencana sehingga memungkinkan analisa yang komprehensif mengenai kecenderungan bencana di Bengkulu.

Sebuah workshop lanjutan akan diselenggarakan untuk menyelesaikan penyesuaian DIBI lokal dan pengumpulan data sejarah tambahan. Pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi Bengkulu, akan memilih peserta untuk pelatihan DIBI. Hal ini diantisipasi bahwa dengan pelatihan awal 2010 Input Data akan terjadi dan pada pertengahan tahun 2010, 30 tahun data yang akan menjadi elektronik tersedia untuk analisis. Data Pengguna Pelatihan akan dilakukan secara paralel dengan input data kemajuan: pembersihan data sehingga memungkinkan dan debugging sementara yang DIBI dihuni.

Model Bengkulu yang direncanakan untuk Sub-DIBI nasional dimaksudkan untuk mendorong inisiatif PRB, embed kepemilikan lokal dan data DIBI lokal, sementara juga mengurangi beban BNPB untuk mengumpulkan data yang diselenggarakan secara regional. DIBI lokal akan dimiliki oleh BPBD dan akhirnya terkait dengan DIBI nasional, memungkinkan untuk intra-provinsi yang komprehensif dan perbandingan antar provinsi. Diharapkan sampai awal 2010 pelatihan Data Input telah selesai dilaksanakan dan pada pertengahan 2010, data selama 30 tahun telah tersedia secara elektronik untuk dianalisa. Pelatihan Data User akan dilaksanakan sejalan dengan kemajuan data input: oleh karena itu pembersihan dan penghapusan kesalahan pada data (data cleaning and debugging) dapat dilakukan sementara DIBI diisi dengan data.

Perencanaan Model Bengkulu untuk DIBI di tingkat daerah ditujukan untuk menggerakkan inisiatif DRR, menanamkan kepemilikan data lokal dan DIBI lokal, serta mengurangi hambatan pada BNPB untuk mengumpulkan data yang dimiliki daerah. DIBI lokal akan dimiliki oleh BPBD dan pada akhirnya terhubung dengan DIBI nasional, sehingga memungkinkan perbandingan yang komprehensif inter dan antar provinsi.

**Tabel 2: Propinsi Yogyakarta (DIY) meluncurkan DIBI Jogja.**



Acara Peluncuran DIBI di Jogja

“Pengelolaan data dan informasi bencana adalah elemen utama pengelolaan bencana. Ketersediaan data dan informasi bencana tidak hanya membantu pemangku kepentingan untuk fokus pada upaya pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana, namun juga memungkinkan perencanaan pengelolaan bencana yang

komprehensif dan terpadu,” menurut Wakil Gubernur DIY, Paku Alam IX pada peluncuran Database Pengelolaan Data dan Informasi Bencana DIY (DIBI Jogja) pada 31 Juli 2009.

Sejak gempa bumi besar tahun 2006, DIY telah berusaha untuk meningkatkan kapasitas untuk melacak informasi data bencana. Tetapi baru sekarang, dengan dukungan dari SC-DRR, DIBI Jogja diluncurkan. Danang Samsurizal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) DIY memuji peluncuran: “Akhirnya, kami memiliki sistem yang terstruktur untuk menangkap data dan informasi sejarah yang memungkinkan analisa akurat kecenderungan bencana dan menyoroti kebutuhan pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan.”

Dalam upaya bersama untuk meningkatkan pengelolaan bencana melalui pengelolaan informasi yang lebih baik, BAPEDA DIY dan BNPB, dengan dukungan program SC-DRR, memulai proses dengan lokakarya sosialisasi awal tentang ‘DIBI Jogja’ pada 27 Juni 2009. Lokakarya ini dihadiri oleh wakil-wakil dari instansi pemerintah, universitas, dan LSM lokal dengan agenda yang meliputi presentasi publik pertama mengenai DIBI Jogja dan rancangan strukturnya yang diusulkan. Rancangan tersebut menyertakan beberapa penyesuaian awal untuk konteks lokal. Dari 2003-2008, pengumpulan data dimandatkan kepada BAPEDA dan Kesbanglinmas (Kesatuan Bangsa dan Perlindungan masyarakat) DIY dan keduanya telah mengumpulkan data bencana sampai ke tingkat desa tapi tidak dalam struktur yang sama dan tidak dengan cara yang memungkinkan pemecahan/pemilahan data. Data bencana sebelum tahun 2003 dikumpulkan oleh

konsultan yang didanai oleh program SC-DRR. Data dikumpulkan dari SATLAK (Disaster Response Unit) dan dikombinasikan dengan data yang dipunyai oleh UPNV (Universitas Pembangunan Nasional Veteran) DIY. Data awal disajikan untuk verifikasi di FGD pada 17 Juli 2009 yang dihadiri oleh lembaga-lembaga pemerintah, universitas, dan LSM. Sebagai hasil dari diskusi pemangku kepentingan, disepakati bahwa kapasitas DIBI untuk menangkap data sejarah membuatnya sebagai database yang ideal untuk menggabungkan data dari UPNV DIY, dapat memverifikasi semua data, dan akhirnya menyediakan sarana analisa informasi yang terstruktur - menggunakan metodologi DesInventar: mengatasi keterbatasan 'struktural' sebelumnya pada analisis informasi bencana.

Sesuai dengan Keputusan Presiden yang mengarahkan semua provinsi untuk membentuk BPBD pada tahun 2009, pemerintah DIY akan membentuk BPBD sendiri pada tahun 2009 dan DIBI Jogja akan dimiliki oleh BPBD dan menjadi pusat referensi dan alat perencanaan untuk badan pengelola bencana baru ini. "BAPEDA menyambut baik kesempatan untuk menjadi salah satu provinsi pertama di Indonesia yang memiliki DIBI-nya sendiri", sambut Danang Samsurizal dari BAPEDA DIY.

Sekarang, pada tahun 2009, badan-badan pemerintah di daerah masih menyerahkan data peristiwa bencana dalam bentuk hardcopy (di atas kertas) kepada otoritas pemerintahan yang lebih tinggi, contohnya provinsi menyerahkan laporan hardcopy kepada BNPB dan administrasi kabupaten menyerahkan hardcopy data peristiwa bencana mereka kepada administrasi provinsi. Ke depan, semua BPBD akan mengumpulkan dan melaporkan data secara elektronik kepada administrasi provinsi dan nasional: hal ini akan merepresentasikan lompatan besar dalam efisiensi pemasukan data pada tingkat nasional dan peningkatan dalam validasi informasi bencana yang dapat diakses secara tepat waktu.

Dalam lokakarya sosialisasi, peserta telah diberikan informasi mengenai pengembangan BNPB saat ini, seperti sistem ICT (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan DIBI. Personil BNPB masih menggunakan sistem laporan kejadian bencana harian yang lama. Sekarang, setelah data sejarah hampir selesai dilengkapi untuk 1997-2009,

laporan kejadian bencana harian BNPB akan segera dimasukkan ke dalam DIBI.

Program SCDRR telah secara ambisius menargetkan empat provinsi (dipilih dari tujuh provinsi fokus SCDRR) untuk membentuk BPBD provinsi dan dilengkapi dengan kapasitas untuk meluncurkan sistem pengelolaan informasi bencana model-DIBI mereka sendiri, pada akhir 2009. Pada tahun 2008, atas dasar analisa pendahuluan atas 10 tahun data nasional yang ada pada DIBI, BNPB bersama SCDRR mengidentifikasi tiga provinsi yang harus segera memulai mengumpulkan data yang dimiliki secara lokal sejak tahun 1972. Provinsi yang dipilih adalah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat. Pemilihan provinsi berdasarkan pada tingkat kapasitas dasar dan infrastruktur ICT, keteraturan laporan kepada BNPB dan kualitas validasi data yang tersedia. BNPB dan SCDRR mendukung provinsi-provinsi terpilih ini dengan pengumpulan 30 tahun data di wilayah mereka dan hal ini merupakan langkah pertama terhadap pembentukan DIBI daerah mereka.

Pelatihan pengguna data (Data User Training) berikutnya direncanakan untuk kalangan akademis dan perwakilan media – terutama ditargetkan untuk mereka yang terlibat dalam Plafon Nasional PRB (PLANAS PRB). Keterlibatan kalangan akademis dan organisasi media massa memperkenalkan penggunaan DIBI di luar wilayah pemerintahan dan kemanusiaan, meningkatkan reputasi DIBI sebagai sumber informasi bencana yang akurat dan bermanfaat untuk kalangan pengguna yang lebih luas. Sejalan dengan perluasan pengguna DIBI, SCDRR mengumpulkan daftar ahli DRR nasional pada bidang geografi, tematik dan sains, sesuai dengan pengarusutamaan DRR ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah di Indonesia.

Untuk beberapa waktu, GRIP telah mendorong pengembangan metodologi / perangkat lunak yang dapat menganalisa keterkaitan antara bencana dan kemiskinan atau perubahan iklim. Telah ditunjukkan bahwa hal ini mungkin dilakukan dengan memodifikasi DesInventar. Pada Global Platform DRR, pada 7-10

Juli 2009 di Jenewa, GRIP secara terbuka memuji kerja delegasi Indonesia (BNPB, BAPPENAS, PNPM Bank Dunia dan Program SCDRR UNDP) dalam mendukung integrasi DesInventar dengan data sosial ekonomi, khususnya, menyoroti hubungan antara resiko bencana dan kemiskinan. Integrasi data kemiskinan dan bencana merupakan yang pertama di dunia, dengan dasar data di tingkat negara dapat digali sampai ke tingkat kecamatan. (Lihat Kotak 3 di bawah ini dan <http://simpadu-pnpm.bappenas.go.id> dan <http://bappenas.go.id/node/116/1926/persiapan-mis-PNPM-mandiri/>).

**Tabel 3: Kolaborasi yang lebih luas – Interaksi PNPM MIS, DesInventar dan DIBI**



Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Paskah Suzetta secara resmi meluncurkan SIMPADU PNPM Mandiri

Melalui dukungan SCDRR untuk BNPB, dan dukungan langsung UNDP untuk BAPPENAS, Platform DIBI telah menghasilkan kelompok data yang berhubungan dari penilaian kemiskinan dengan data di dalam DIBI – hal ini telah dilaksanakan bersama dengan program PNPM Bank Dunia yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan

dan desa di Indonesia. Integrasi ini memerlukan banyak perubahan yang diperlukan pada kode asli DesInventar. UNDP telah bekerja erat dengan perusahaan konsultan TI untuk membangun database terpadu yang menampung berbagai format database dan memungkinkan pertukaran data yang mulus antara, misalnya PNPM MIS, DIBI dan DesInventar. Pihak-pihak ini sekarang menggunakan struktur database yang persis sama. Database DesInventar sekarang adalah bagian dari data gudang PNPM dan hubungan antara tabel dijelaskan untuk memastikan bahwa setiap catatan dapat digali lebih rinci dan dinyatakan dengan referensi geografis dan waktu.

Lokakarya sosialisasi PNPM MIS kedua dihadiri oleh lebih dari 30 peserta dari badan-badan pemerintah yang lebih luas yang menunjukkan dukungan pemerintah atas interaksi PNPM, DesInventar dan DIBI. Contoh yang digunakan pada saat lokakarya adalah PNPM MIS menampilkan data nyata di lapangan dan memberikan contoh kepada para peserta analisa jenis kemiskinan yang dimungkinkan dengan referensi silang dengan data DesInventar. Lintas-data antara PNPM dan DIBI memungkinkan analisa seperti hubungan antara tingkat kemiskinan dan peristiwa bencana, serta menyediakan pilihan untuk peta dan bagan hubungan ini sepanjang waktu.

Gabungan PNPM MIS, DIBI, tim BAPPENAS sedang dalam proses mempersiapkan manual pengguna, baik untuk pengguna publik dan tim pengelolaan. Situs ini masih sedang diuji dan tim secara terus-menerus memperbaiki situs dan memperbaiki kesalahan-kesalahan pada program.

# Tantangan Apa yang Telah Dihadapi DIBI? Bagaimana Tantangan ini Diatasi?

Selama evolusinya DIBI telah menemui tantangan keuangan, teknis, teknologi, birokrasi dan politik. Tantangan-tantangan dirinci lebih jauh di bawah ini.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pendahuluan, pada tahun 2005, iklim politik tidak kondusif untuk siap menerima DesInventar (program dasar DIBI). Dan, tidak berubah sampai adanya pengenalan Undang-Undang 24/2007 mengenai Pengelolaan Bencana, bahwa BNPB yang diberdayakan diyakinkan mengenai nilai sistem pengelolaan informasi yang diajukan. Kesabaran dan ketekunan adalah penting sampai akhirnya diterimanya DIBI oleh Pemerintah Indonesia.

Program SCDRR menargetkan 7 provinsi dan daerah sementara mendukung BNPB di tingkat nasional. Ketika dukungan di tingkat nasional kepada BAPPENAS dan BNPB telah didokumentasikan dengan baik dan dihargai, hambatan keuangan muncul pada pembayaran dana dari mitra pemerintah pusat (dalam hal ini BAPPENAS) kepada administrasi

daerah provinsi menjadi hutang yang problematis kepada peraturan keuangan Pemerintah Indonesia yang terlalu kompleks. Aliran dana kepada provinsi-provinsi target lebih pelan dari yang direncanakan, dengan memerlukan persetujuan dari BAPPENAS, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan. Penundaan ini berarti pemberdayaan daerah melalui agenda DRR telah dipertaruhkan: penilaian resiko belum dilaksanakan, dorongan reformasi legislatif yang mendukung DRR kurang dari yang dibutuhkan dan pengumpulan data dan pencapaian DIBI lebih lambat dari yang direncanakan. UNDP telah bekerja dengan Pemerintah Indonesia (Depdagri, Depkeu, BAPPENAS) untuk membuat pengaturan fiskal yang memenuhi kebutuhan Pemerintah Indonesia dan program-program tersebut secara memadai.

Sementara tujuan DIBI adalah untuk menyediakan informasi sejarah bencana, DIBI juga menyediakan kesempatan untuk mengidentifikasi kecenderungan, resiko dan kerentanan. Bagaimanapun,

bahwa ketika resiko bencana telah diidentifikasi, kerentanan diketahui dan didukung oleh data sejarah, prioritas daerah telah menyebabkan kesensitifan politik. Pada satu sisi, DIBI dan program SCDRR berdasarkan pada falsafah keterbukaan akses terhadap informasi dan transparansi dalam tindakan untuk DRR, sementara itu pada kenyataannya, ketika daerah-daerah berkompetisi untuk status dan dana dan informasi yang paling berguna terkadang sensitif secara politik dan tidak dipublikasikan. Ketika data dari BPS memberikan jendela kepada status pada masing-masing dan setiap daerah administratif di Indonesia, dan terbuka untuk publik, dan ranking daerah administratif muncul, informasi yang didapatkan melalui alat seperti DIBI dan PNPM MIS dapat memberikan persepsi yang detail dan mendalam kepada informasi dan menyebabkan munculnya isu-isu yang tidak menyenangkan. Pertemuan-pertemuan baru-baru ini telah diadakan antara Depdagri, Depkeu, BAPPENAS dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat untuk menentukan informasi apa yang dapat dibuka kepada publik

melalui PNPM MIS, dan DIBI. Sebuah proses harus dikembangkan mengurangi kesensitifan administrasi dan mempengaruhi budaya 'lapar pengetahuan' yang mendukung transparansi informasi baik 'positif' maupun 'negatif'.

Sebagai tambahan terhadap isu transparansi dan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh PNPM MIS adalah tidak adanya akurasi data ketika diambil secara langsung dari sektor program. Saat ini, data-data ini ditampilkan apa adanya; belum dibersihkan dari angka-angka yang tidak masuk akal, yang menyebabkan kesalahan pada kesimpulan yang diambil. Oleh sebab itu diperlukan usaha untuk membersihkan data secara bersama.

DIBI masih menghadapi tantangan teknis dan teknologi karena memproses data-data untuk ditampilkan di daerah, khususnya kapasitas daerah untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan informasi gaya DIBI. Kapasitas daerah, dalam konteks ini berarti – sumber daya manusia

serta infrastruktur ICT: defisiensi ini sebagian bertanggungjawab untuk 'penolakan' yang disebutkan pada ringkasan wawancara pada tabel 4 di bawah. Bahkan pada tingkat nasional, ada yang menyatakan bahwa DIBI rumit – tidak mudah digunakan. Meskipun tutorial sederhana kini disediakan secara on-line, statistik penggunaan web mengindikasikan bahwa penggunaan dan kompleksitas penggunaan DIBI muncul setelah dilaksanakannya Pelatihan Pengguna Data dan pembangunan kapasitas. Sesi pelatihan BNPB / DIBI SCDRR belum menerapkan alat evaluasi untuk menilai efektifitas training yang dilaksanakan: survei sederhana sebelum pelatihan mengenai pengetahuan DIBI yang diikuti oleh survey setelah pelatihan (atau tes on-line) dapat dikembangkan untuk mengisi celah ini. Solusi untuk mengatasi masalah ini telah sebagian diatasi melalui pengembangan model Bengkulu untuk penampilan data. (Lihat tabel 1 di atas).

**Kotak 4: Kutipan yang telah di-edit dari 'Pemerintah Menjanjikan Pengelolaan Bencana yang Lebih Baik' Jakarta Post, Selasa 22 April, 2008. Kepala BNPB, Syamsul Ma'arif (SM) yang diwawancarai oleh Andra Wisnu (AW).**

AW: Bagaimana dengan ketersediaan sumber daya manusia? Apakah Anda memiliki orang-orang yang terlatih khusus untuk membantu menangani bencana?

SM: Ya. Dalam badan kita, kita memiliki mantan anggota tim BAKORNAS PB. Banyak personil tersebut yang ahli di bidang-bidang khusus, termasuk mereka yang terlibat dalam pengembangan jaringan dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi yang akan membangun kemampuan teknis menyangkut bencana yang sesuai. Kami berharap dapat memperluas jaringan profesional ke seluruh negeri. Namun pemerintah daerah kadang-kadang tidak responsif atau tidak mau bertindak sebagai tuan rumah kepada ahli-ahli ini: sesuatu yang kita masih tidak dapat sepenuhnya mengerti. Saya terus menghimbau pemerintah daerah menjadi tuan rumah bagi para ahli sebagai konsultan untuk peraturan dan perundang-undangan bencana mereka. Para ahli ini dapat memberikan manfaat besar bagi daerah ini - mengingat - tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua perencanaan pembangunan di negara ini didasarkan pada pengurangan resiko bencana.

# Pelajaran apa yang dapat dipetik dari Cerita Pengelolaan Data dan Informasi Bencana di Indonesia?

## **1. Keberhasilan memperkenalkan alat pengelola informasi baru yang kuat tergantung dari waktu dan pemasaran.**

Ketika UNDP pada awalnya mengedepankan DesInventar sebagai database ideal sebagai pelacak bencana Indonesia, tidak ada pemerhati yang mau menerima. Pada saat itu BAKORNAS PB sedang dalam masa perubahan, menunggu proses reformasi hukum untuk pengelolaan bencana di Indonesia. Lagipula BAKORNAS PB telah mempunyai database-nya sendiri. Cara pengenalan DesInventar – sama seperti pengenalan database lainnya - tidak “menjual” perangkat lunaknya. Hanya setelah Undang-Undang Pengelolaan Bencana 24/2007 ditetapkan, dan BNPB ditetapkan sebagai badan pengelola bencana nasional di semua tahapan siklus pengelolaan bencana, baru kemudian ‘pembeli’ yang berminat ditemukan. Sementara itu UNDP menyimpulkan dari hasil refleksinya bahwa pemasaran sebelumnya untuk DesInventar telah dikemas dengan buruk. Sementara itu, program SCDRR

diselesaikan dan dukungan untuk BNPB dan provinsi-provinsi target untuk pelacakan dan pengelolaan informasi bencana yang pada akhirnya menghasilkan transfer DesInventar yang sukses: dikenal sebagai Database Pengelolaan Data dan Informasi Bencana (DIBI) milik BNPB.

## **2. Kapasitas perlu untuk dinilai sebelum dapat dibangun.**

Sementara pada tingkat nasional DIBI diterima oleh banyak Departemen Pemerintahan dan komunitas pengelolaan bencana, didapati kekosongan infrastruktur, personil (human capital), keahlian teknis dan pengetahuan teknologi di banyak administrasi daerah. Kapasitas daerah di dalam provinsi-provinsi target harus dinilai dengan cermat sebelum mencoba untuk menampilkan sistem pengelolaan informasi model-DIBI pada tingkat daerah. Penilaian kapasitas daerah sebelumnya ini memungkinkan penentuan target kebutuhan pelatihan yang lebih baik serta penentuan target sumber daya keuangan yang lebih baik untuk

biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia.

**3. Pentingnya diadakan evaluasi terhadap pelatihan disebabkan beberapa alasan, yaitu: untuk memastikan efektifitas, mengetahui perlu atau tidaknya pelatihan diulang, dan untuk perbaikan metodologi pelatihan yang berkelanjutan. Pelatihan DIBI telah dilaksanakan, tetapi sistem evaluasi atas pelatihan tersebut belum diterapkan.**

Model Bengkulu untuk penampilan DIBI di daerah (Tabel 1 di atas), tidak mencakup penilaian kepuasan peserta mengenai lokakarya sosialisasi, FGD, dan Modul Pelatihan. SCDRR lebih mempercayai pada praktek pengawasan internal daripada pengawasan yang diterapkan untuk aktivitas lapangan. Beberapa metode yang disarankan adalah: evaluasi daftar pertanyaan sederhana untuk peserta atau ujian sebelum training dan pada saat sesi pelatihan berakhir. Untuk memantau kepuasan peserta dan penggunaan keterampilan yang

dipelajari dapat dengan membuat Nama Pengguna (User Name) & Kata Sandi (Password) untuk mengakses DIBI yang berbeda untuk masing-masing peserta. Pemakaian Identifikasi Pengguna tersebut dapat didorong dengan menyediakan 'keuntungan-keuntungan tambahan' di dalam situs web. Identifikasi pengguna tersebut akan memungkinkan pemantauan yang efektif mengenai penggunaan DIBI oleh peserta dan penggunaan yang lebih kompleks setelah pelatihan dan setelah jangka waktu yang lebih lama.

**4. Peserta dalam pelatihan sistem seperti DIBI memerlukan waktu untuk me-refleksi dan mencerna materi di antara sesi pelatihan.**

Karena pelaksanaan pelatihan yang sangat cepat, kadang-kadang peserta pelatihan mendapatkan kesulitan untuk memahami: khususnya mereka yang tidak akrab dengan ICT (Teknologi Informasi & Komunikasi) atau tidak mempunyai akses untuk infrastruktur ICT. Pengguna DIBI memerlukan waktu untuk menggunakan perangkat

---

lunak dan untuk terbiasa untuk memanipulasi format pertanyaan dan lain-lain sebelum mengembangkan keterampilan untuk struktur analisa yang lebih kompleks. (Lihat Pelajaran 2, di atas.)

**5. Kolaborasi menghasilkan inovasi.**

Partisipasi tim SCDRR UNDP dalam pengembangan dan keterkaitan PNPM MIS dan DIBI dengan cepat telah menumbuhkan tingkat dan jenis analisa yang mungkin didapat dengan data yang sesuai.

# Sumber daya dan alat yang bermanfaat:

---

## **Strategi Internasional PBB untuk Pengurangan Bencana (UNISDR) [www.unisdr.org](http://www.unisdr.org)**

ISDR bertujuan membangun masyarakat yang tahan terhadap bencana dengan mendorong peningkatan kesadaran tentang pentingnya pengurangan bencana sebagai komponen integral dari pembangunan berkelanjutan, dengan tujuan mengurangi hilangnya jiwa, kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan akibat bencana alam dan bencana teknologi dan lingkungan terkait.

## **Program Identifikasi Resiko Global (GRIP) [www.gripweb.org](http://www.gripweb.org)**

GRIP adalah inisiatif para pemangku kepentingan yang secara langsung sejalan dengan Area Prioritas 2 Kerangka Kerja Hyogo (HFA): Identifikasi resiko, pengkajian dan pemantauan. Meskipun berada di dalam UNDP, struktur GRIP pada dasarnya adalah multi- pemangku kepentingan, karena ini adalah rangkaian kegiatan selaras yang berkontribusi untuk tujuan yang telah disepakati bersama.

## **Database Peristiwa Darurat (EMDAT) [www.emdat.org](http://www.emdat.org)**

Tujuan utama dari database internasional ini adalah untuk melayani tujuan aksi kemanusiaan di tingkat nasional dan internasional. Ini adalah inisiatif yang ditujukan untuk merasionalisasi pengambilan keputusan untuk kewaspadaan bencana, serta memberikan dasar yang obyektif untuk penilaian kerentanan dan penetapan prioritas.

# Lampiran 1

## Peluncuran SIMPADU PNPM MANDIRI

32



Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Paskah Suzetta merinci program PNPM Mandiri dan Tujuan SIMPADU selama peluncuran



Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Paskah Suzetta secara resmi meluncurkan SIMPADU PNPM Mandiri



Deputi Country Director Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Elena Tischenko menerima buku panduan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Para peserta



Dari kiri ke kanan: Kepala Subdirektorat, Departemen Pekerjaan Umum - Mr Ismono, Asisten Deputi Menteri Koordinator Bidang Penganggulangan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat - Mr Soepeno Sahid, Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Pedesaan - Mr Ayip Muflih, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional - Mr Paskah Suzetta, Deputi Menteri Penanggulangan Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM - Mr Prasetyono Widjojo, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Pedesaan, Deputi Direktur United Nations Development Program - Ms Elena Tischenko, Program Manager Bank Dunia - Ms Desy Mutialim

### Informasi tambahan:

<http://www.DesInventar.net>  
<http://www.sc-drr.org>  
<http://dibi.bnbp.go.id>

MIS PNPM berdasarkan Desinventar sekarang online -- pengguna umum hanya dapat melihat dashboard, halaman pertanyaan, melihat data dan melihat peta. Data dari <http://dibi.bnbp.go.id> sekarang dapat diakses dan diimpor ke <http://simpadu-pnpm.bappenas.go.id>, namun, akses dibatasi untuk pengguna yang terdaftar.

### Hubungi:

[ridwan.yunus@undp.org](mailto:ridwan.yunus@undp.org) - Program Associate -  
 Informasi Pengelolaan  
[ibnuzeinhamzah@gmail.com](mailto:ibnuzeinhamzah@gmail.com) - DIBI Programming dan  
 Database  
[yantisa.akhadi@undp.org](mailto:yantisa.akhadi@undp.org) - Webmaster

*The views expressed in this publication are those of the author(s) and do not necessarily represent those of the United Nations, including UNDP, or their Member States.*



## SC-DRR

Safer Communities  
through Disaster Risk Reduction  
in Development Programme

supported by:



Australian Government  
AusAID



United Nations Development Programme  
Menara Thamrin Building, 8-9th Floor  
Kav. 3 Jl. M.H. Thamrin, Jakarta 10250, Indonesia

[www.undp.or.id](http://www.undp.or.id)